

# Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi bagi Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bandar Lampung dalam Membangun Semangat Nasionalisme dan Demokrasi

Himawan Indrajat<sup>1\*</sup>, Robi Cahyadi Kurniawan<sup>2</sup>, Dedy Hermawan<sup>3</sup>, Bendi Juantara<sup>4</sup>  
<sup>1,2,4</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan & <sup>3</sup> Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung  
\*Jalan Sumantri Brodjonegoro, No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145  
\*Korespondensi: [himawan.indrajat@fisip.unila.ac.id](mailto:himawan.indrajat@fisip.unila.ac.id)

## Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan demokrasi bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Karena seperti kita ketahui bahwa hasil dari survey Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Tahun 2017 menempatkan provinsi Lampung dalam provinsi dengan tingkat radikalisme tertinggi. Kemudian hasil penelitian FKPT (Forum Kordinasi Penanggulangan Terorisme) Provinsi Lampung Bandar Lampung merupakan yang masuk dalam daerah rawan radikalisme. Berdasarkan hasil penelitian BNPT dan FKPT Provinsi Lampung maka sasaran pendidikan wawasan kebangsaan dan demokrasi ini adalah generasi muda yang terdiri dari pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan bertujuan agar dapat memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai demokrasi sehingga bisa mencegah pemahaman radikalisme dan memiliki tingkat melek politik yang demokratis.

Pengabdian dilakukan dalam bentuk penjangjagan pengetahuan dan pemahaman peserta dengan menggunakan evaluasi awal melalui pre test. Cara ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta pendidikan wawasan kebangsaan dan demokrasi mengenai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta Sistem Politik Indonesia. Evaluasi akhir melalui post test dan diskusi atas masalah-masalah yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan. Diharapkan dengan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi ini mampu meningkatkan rasa nasionalisme, toleransi dan melek politik.

**Kata Kunci :** Wawasan Kebangsaan, Demokrasi, Pelajar dan Mahasiswa

## 1. ANALISIS SITUASI

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 265 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di Dunia. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, budaya, bahasa, dan agama yang hidup secara bersama di

berbagai pulau di Seluruh Wilayah Indonesia. Dengan heterogennya masyarakat Indonesia dapat menjadi kekuatan suatu bangsa, namun disisi lain dapat berakibat sebaliknya. Karena kekuatan dan kelemahan suatu masyarakat yang heterogen harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi penyebab kehancuran suatu bangsa. Apabila muncul kelemahan berupa kegagalan dalam mengelola keragaman masyarakat akan berdampak pada konflik sosial berkepanjangan, dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, munculnya radikalisme, terorisme, separatisme, dan lainnya.

Sudah banyak contoh negara yang gagal dalam mengelola keragaman yang mereka miliki dan menyebabkan kehancuran negara tersebut, seperti gagalnya Yugoslavia dan Uni Soviet yang tidak mampu mengelola keragaman etnis dan agama yang ada sehingga kedua negara tersebut terpecah menjadi negara-negara kecil dan banyak memakan korban jiwa akibat kegagalan tersebut. Atau seperti yang terjadi di Suriah, Libya, Afghanistan dan Irak yang masih mengalami perang saudara karena perbedaan ideologi dan golongan. Sejak berdiri sebagai negara tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia telah berusaha seoptimal mungkin menjaga, memelihara dan mengelola keanekaragaman suku bangsa, ras, agama, dan budaya masyarakatnya. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan mencegah konflik sosial di tengah masyarakat. Upaya tersebut tidaklah mudah, karena potensi ancaman dan peristiwa konflik senantiasa hadir dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, sumber daya alam, dan sebagainya.

Provinsi Lampung merupakan miniatur Indonesia. Masyarakat yang tinggal di Provinsi Lampung sangat beragam dari aspek etnis, suku bangsa, budaya, dan agama. Struktur masyarakat Lampung terdiri dari masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Masyarakat asli Lampung merupakan masyarakat adat yang geneologis (garis keturunan berdasarkan ikatan darah) dan terdiri dari masyarakat Adat Lampung Pepadun dan Saibatin. Sementara masyarakat pendatang berasal dari Jawa, Bali, Semendo Ogan (Sumatera Selatan), Sunda dan Banten dll. Lampung juga menjadi tempat perlintasan dari Jawa dan Sumatera mudahnya mobilitas penduduk tersebut, memudahkan ajaran atau aliran yang berpaham radikalisme berkembang di daerah tersebut.

Bukti berkembangnya paham radikalisme di provinsi Lampung adalah adanya penangkapan terduga teroris di provinsi Lampung, di tahun 2018 sudah dilakukan

3 penangkapan ditempat yang berbeda terhadap lima orang terduga teroris seperti yang diberitakan oleh msn.com mengutip dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Lampung.

Tito mengaku sudah mendapat informasi tentang operasi Densus 88 Antiteror di Lampung. Ia menyebutkan lima orang yang diamankan di Lampung dalam tiga pekan terakhir, merupakan jaringan kelompok radikalisme Jamaah Ansarut Daulah (JAD). Pimpinan JAD di tanah air yakni Aman Abdurrahman. "(Mereka) Jaringan JAD. Saya selalu sampaikan setiap kesempatan yang bermain (membuat teror) ini kelompok JAD," kata Tito saat melakukan Safari Ramadan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Makorem 043/Gatam, Bandar Lampung (Hendrawan, 2018)

Pasca-bom Surabaya, aparat Densus 88 Antiteror melakukan operasi pemberantasan terorisme secara massif. Lima orang terduga teroris diamankan di Lampung. Dua orang ditangkap di Gedong Tataan dan Way Huwi medio pertengahan Mei lalu, sedangkan tiga orang diamankan di Pringsewu, Minggu (3/6). Ketiga terduga teroris di Pringsewu yakni Uj (43), sehari-hari berprofesi sebagai penjual obat tradisional, kemudian Im (42) yang berprofesi sebagai penjual kue aneka keripik khas Lampung. Terakhir, In atau Hen (37), penjual motor bekas. Kapolri mengakui ada jaringan terorisme di Lampung (Hendrawan, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian FKPT Provinsi Lampung terdapat enam daerah di wilayah Lampung rawan tindakan radikalisme. FKPT telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menangani hal tersebut sehingga paham tersebut tidak berkembang. Enam daerah yang menjadi penelitian FKPT daerah rawan paham radikalisme yakni, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Timur (Yasland & Indrawan, 2016). Berdasarkan hasil survey BNPT menurut Kapolda Lampung Irjen Suntana seperti dikutip dari Media Indonesia Lampung dalam jajaran wilayah potensi radikalisme di luar dugaan banyak pihak. Karena selama ini pergerakan kaum radikal tersebut tidak begitu menonjol. Namun setelah diselidiki, terdapat 101 orang di Lampung yang terindikasi sebagai simpatisan Islamic State (IS) yang tersebar di 11 kabupaten. Suntana menambahkan, kebanyakan pelaku tindakan radikalisme memiliki latar belakang pendidikan menengah. Yaitu lulusan SMA (63,6%), drop out atau dikeluarkan dari perguruan tinggi (5,5%), dan lulusan perguruan tinggi (16,4%). Strategi penyebaran ideologi

radikal, jelas dia, dilakukan melalui komunikasi langsung, perkawinan, kegiatan dakwah, penerbitan buku, jalur pendidikan, dan media internet. Pihak perguruan tinggi harus terus mengawasi setiap kegiatan mahasiswa yang mencurigakan. Sebab, menurut Suntana, mahasiswa banyak menjadi sasaran penyebaran ideologi radikal melalui aktivitas dakwah di kampus (Pardiana, 2018).

Lampung sebagai tempat perlintasan Jawa dan Sumatera dan penduduknya beragam, dengan mobilitas penduduk tersebut memudahkan ajaran atau aliran yang berpaham radikalisme berkembang di daerah tersebut. Apalagi di Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan dan bisnis Provinsi Lampung penduduknya lebih beragam tentu juga menyimpan potensi untuk berkembangnya paham radikalisme apalagi peristiwa penangkapan tersangka terorisme di kota ini sudah

Upaya meredam potensi radikalisme dan membangun sistem peringatan dini dapat melalui pendidikan yang menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara serta berdemokrasi bagi generasi muda, agar bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan demokrasi pada generasi penerus cita-cita bangsa ini. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara sendiri berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 (Ferrijana, dkk., 2012).

Dari latar belakang analisa situasi dan permasalahan mitra tersebut maka tujuan dari kegiatan pengabdian pendidikan wawasan kebangsaan sebagai berikut, (1) diperlukannya pendidikan wawasan kebangsaan dan demokrasi bagi generasi muda terutama pelajar SMA dan mahasiswa agar mereka sebagai generasi muda dapat memahami tentang nilai-nilai nasionalisme, toleransi dan demokrasi. (2) menciptakan generasi muda yang nasionalis, toleran dan demokratis untuk menyebarkan nilai-nilai nasionalisme dan demokratis kepada masyarakat sehingga bisa mencegah penyebaran paham radikalisme.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

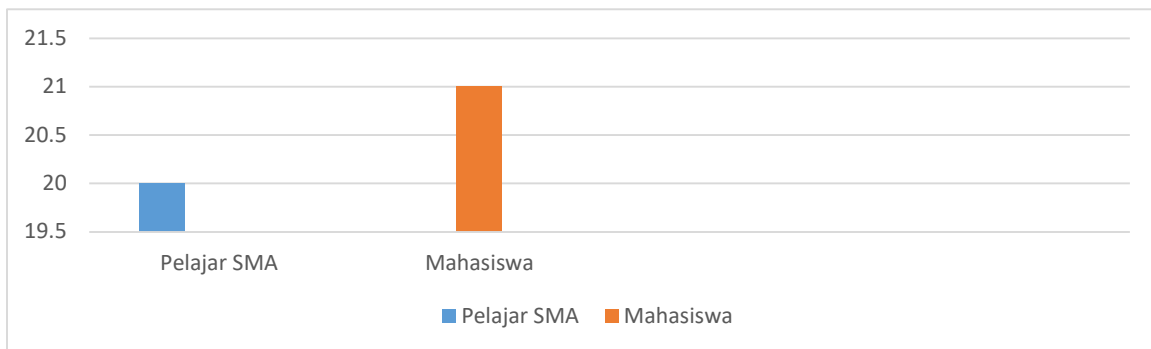
Pelaksanaan program ini disusun secara sistematis pada alur kerja dengan Pendekatan partisipatif, pembelajaran (teori dan praktik), serta pendampingan dengan uraian sebagai berikut:

- a) Pendekatan partisipatif dilakukan secara koordinatif, melibatkan tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) dengan mitra pelajar dan mahasiswa.
- b) Pendekatan teori dan praktek dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, tatap muka dan penugasan baik teori maupun praktik.
- c) Pendampingan dilakukan dengan evaluasi kegiatan selanjutnya dilakukan refleksi dan keberlanjutan dalam bentuk monitoring dan pendampingan, baik terprogram maupun insidental guna menjaga kualitas hasil kegiatan serta meningkatkan kemitraan.

Pengukuran keberhasilan materi pengabdian dengan menggunakan Penjajagan pengetahuan dan pemahaman peserta seminar dengan menggunakan evaluasi awal melalui pre test. Cara ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM, radikalisme dan terorisme serta 4 konsensus nasional. Memberikan materi seminar berupa makalah dan simulasi yang berkaitan dengan wawasan nusantara, demokrasi dan HAM, radikalisme dan terorisme, serta 4 konsensus nasional. Evaluasi akhir melalui post test dan diskusi atas masalah-masalah yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan

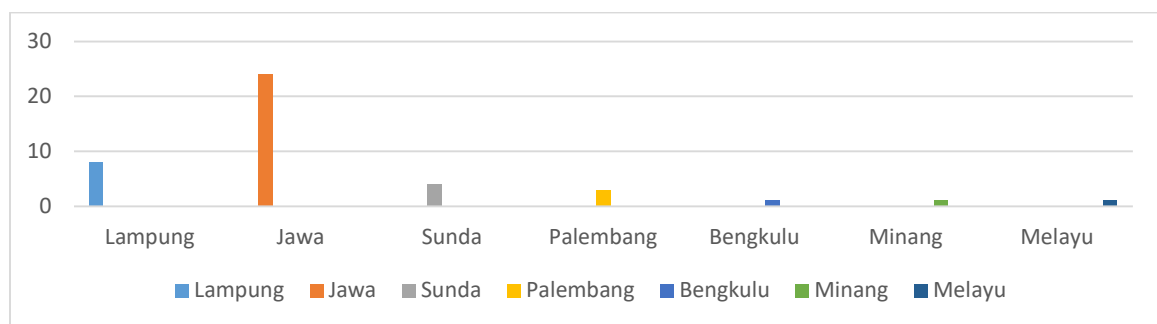
### **3. PELAKSANAAN DAN HASIL**

Peserta pendidikan wawasan kebangsaan dan demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 adalah para pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung yang merupakan pemilih pemula, jumlah peserta yang mengikuti pendidikan demokrasi berjumlah 41 orang yang terdiri dari 21 mahasiswa dan 20 pelajar SMA. Acara pengabdian pendidikan demokrasi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media zoom. Berikut ini grafik peserta pendidikan demokrasi.



**Grafik 1. Peserta pelatihan berdasarkan status**  
Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Kemudian berdasarkan asal suku peserta terdiri dari 24 orang bersuku Jawa, 8 orang bersuku Lampung, 3 orang bersuku Sunda, 1 orang bersuku Bengkulu, 1 orang bersuku Melayu Kalimantan, 3 orang bersuku Palembang, 1 orang bersuku Minang. Berikut ini jumlah grafik peserta berdasarkan jenis kelamin. Dari beragamnya asal suku peserta menunjukkan betapa multikulturalnya penduduk provinsi Lampung serta menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.

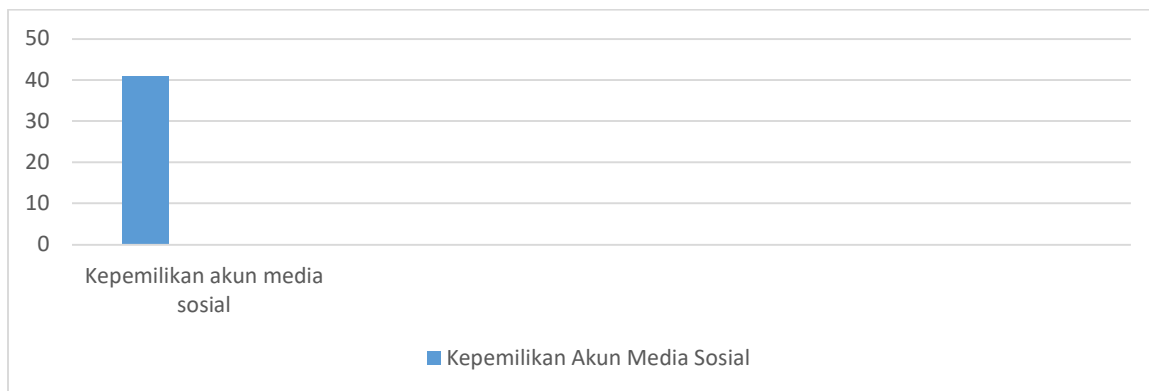


**Grafik 2. Peserta pelatihan berdasarkan suku bangsa**  
Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Beragamnya asal suku peserta menunjukkan betapa multikulturalnya penduduk provinsi Lampung serta menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan rasa nasionalisme dan membangun nilai-nilai demokratisasi, apalagi adanya ancaman penyebaran pemahaman radikalisme dan intoleransi kepada generasi muda di Provinsi Lampung. Oleh karena itu diperlukan pendidikan wawasan kebangsaan

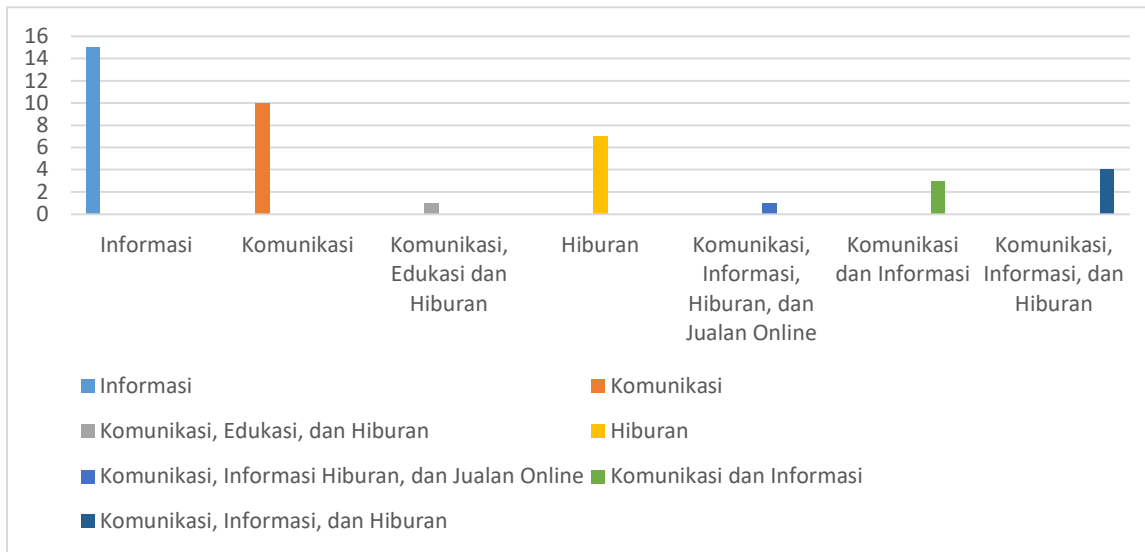
dan demokrasi untuk memberikan pemahaman nilai-nilai nasionalisme, berdemokrasi dan bernegara pada generasi muda. Serta memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya sehingga keragaman itu perlu dirawat dan dikelola dengan baik.

Dalam masa sekarang ini masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya dapat mengakses berita atau informasi mengenai kondisi sosial politik nasional maupun internasional melalui internet bisa dari situs berita atau bisa juga melalui media social, maraknya penggunaan internet untuk mendapatkan informasi sosial politik nasional bisa dimanfaatkan untuk penyebaran nilai-nilai wawasan kebangsaan dan demokrasi sehingga bisa terbangun semangat nasionalisme, tetapi ada sisi negative dari penggunaan sosial media yaitu penyebaran paham radikalisme dan intoleransi karena itu dibutuhkan pendampingan terhadap generasi muda agar mereka tidak terpapar paham radikalisme . Generasi muda peserta pendidikan wawasan kebangsaan dan demokrasi yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa biasa mendapatkan informasi dari media social karena seringkali mereka menggunakan internet. Berikut ini grafik kepemilikan akun media social oleh peserta pendidikan demokrasi dari 41 peserta semuanya memiliki akun media social dan grafik tujuan mereka menggunakan media social.



**Grafik 3. Peserta pelatihan berdasarkan kepemilikan media sosial**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021



**Grafik 4. Tujuan menggunakan media sosial**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Walaupun tujuan pengguna akun media sosial berbeda tetapi semua peserta pernah mendapatkan informasi tentang politik Indonesia dari akun media sosial mereka, berikut ini grafik jumlah peserta yang pernah mendapatkan informasi tentang politik Indonesia.

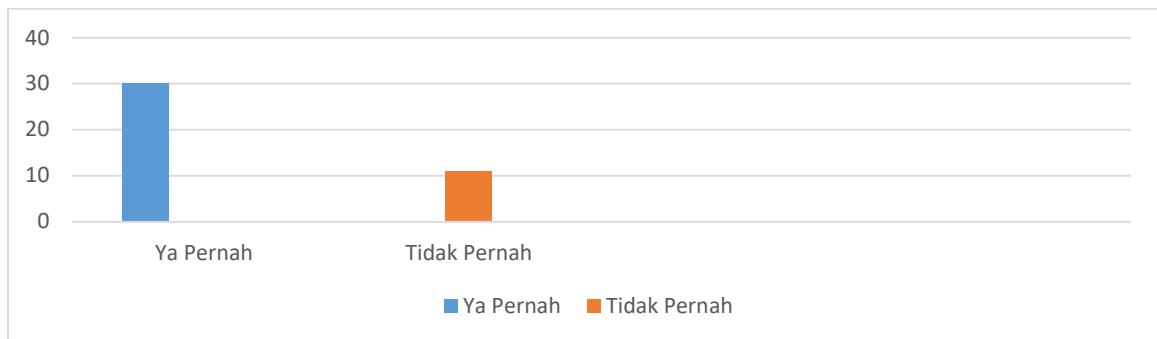


**Grafik 5. Pengalaman mendapatkan berita politik dari media sosial**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021



Ketika kita bicara tentang politik nasional kita juga memperbincangkan penggunaan politik identitas untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat melalui sentimen kesamaan-kesamaan identitas dan sentimen identitas yang berbeda melalui ujaran-ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Berikut ini data grafik informasi tentang ujaran kebencian yang pernah peserta pelatihan dapatkan dari media sosial, tetapi ada beberapa peserta yang tidak pernah mendapatkan informasi tentang ujaran kebencian.



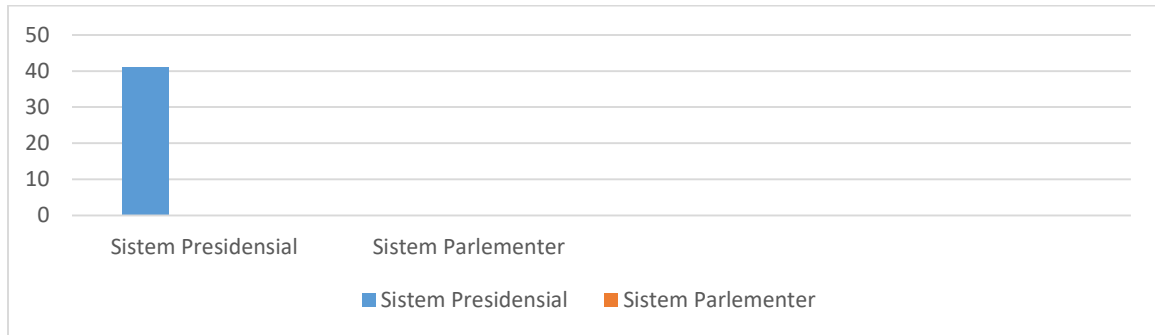
**Grafik 6. Pengalaman mendapatkan informasi tentang ujaran kebencian**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Dari grafik diatas terdapat 30 orang peserta yang pernah mendapatkan informasi mengenai ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus agar informasi tersebut bisa menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai radikalisme dan intoleransi kepada generasi muda. Mereka perlu diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dari pemahaman bahwa Indonesia dibangun dari fondasi beragamanya suku, agama dan budaya sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai serta jangan sampai ada dominasi suku atau agama tertentu. Atau jangan sampai muncul kebencian terhadap perbedaan suku, agama dan budaya.

Kemudian di tingkat pengetahuan tentang demokrasi dilihat dari pengetahuan peserta tentang system pemerintahan Indonesia semua peserta pada saat pre test mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil bukan menggunakan system pemerintahan parlementer, dan berapa tahun sekali pelaksanaan pemilihan umum semua peserta mengetahui bahwa pemilihan

umum dilaksanakan lima tahun sekali. Berikut ini grafik soal pengetahuan system pemerintahan Indonesia dan periode pelaksanaan pemilihan umum.

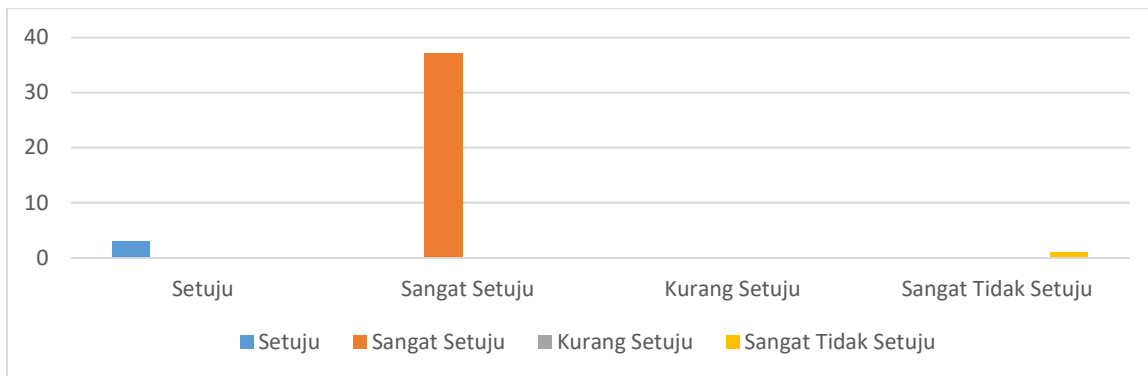


**Grafik 7. Pengetahuan tentang sistem pemerintahan Indonesia**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

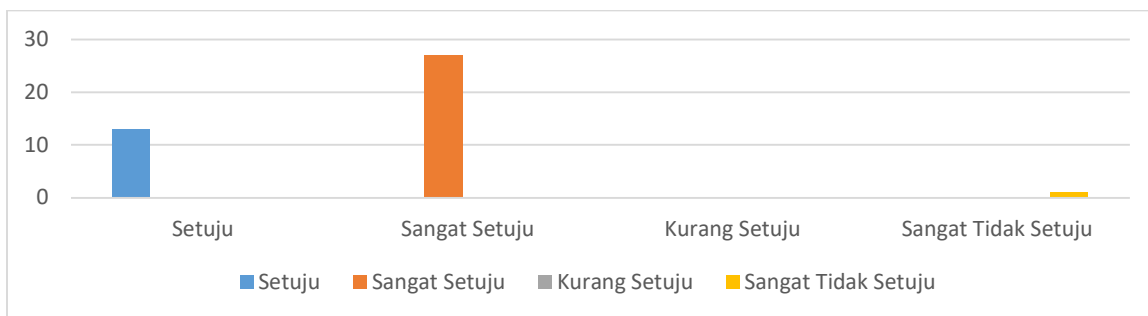
Masih terdapatnya peserta pelatihan yang kurang tepat menjawab atau tidak tahu tentang tanggal pengesahan konstitusi Indonesia perlu mendapat perhatian khusus, karena ini adalah hal yang sering terlupa padahal proses pengesahannya merupakan proses yang Panjang dan konstitusi ini berusaha mengakomodasi kepentingan seluruh warga negara Indonesia seperti pada kasus piagam Jakarta yang menghilangkan kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya karena keberatan dari wakil-wakil dari Indonesia Timur yang mayoritas adalah beragama Kristen dan akhirnya terjadi konsesus sehingga konstitusi bisa disahkan.

Pada penerimaan keragaman bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat provinsi Lampung adalah masyarakat yang multicultural dari berbagai macam suku, agama dan budaya 40 peserta menerima keragaman tersebut dan hanya 1 peserta yang tidak setuju. Kemudian pada pertanyaan apakah merasa nyaman bertetangga dengan yang berbeda suku dan agama ada 1 orang yang menjawab kurang setuju, serta apakah nyaman berteman dengan yang berbeda suku dan agama ternyata terdapat satu orang yang kurang setuju. Berikut ini grafik penerimaan terhadap keragaman masyarakat Indonesia dan keragaman masyarakat Lampung. Serta grafik penerimaan terhadap tetangga yang berbeda suku dan agama, dan teman yang berbeda suku dan agama.



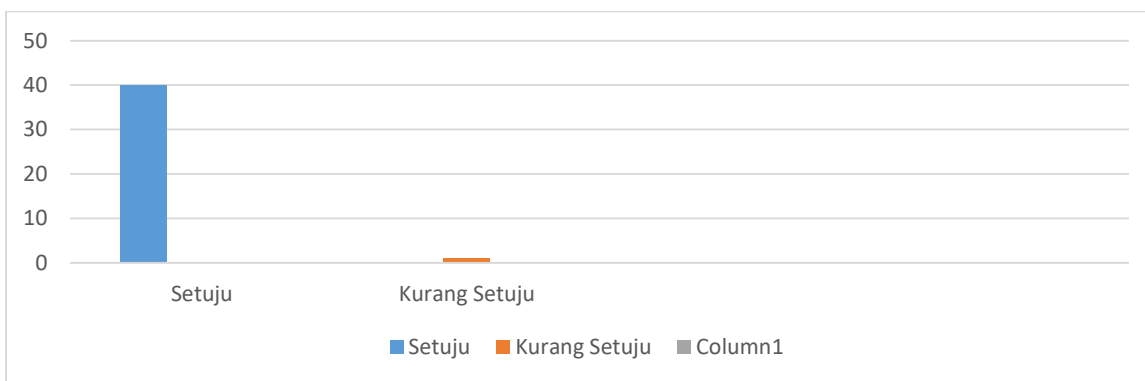
**Grafik 8. Pendapat tentang masyarakat Indonesia multikultural**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021



**Grafik 8. Pendapat tentang masyarakat Indonesia multikultural**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

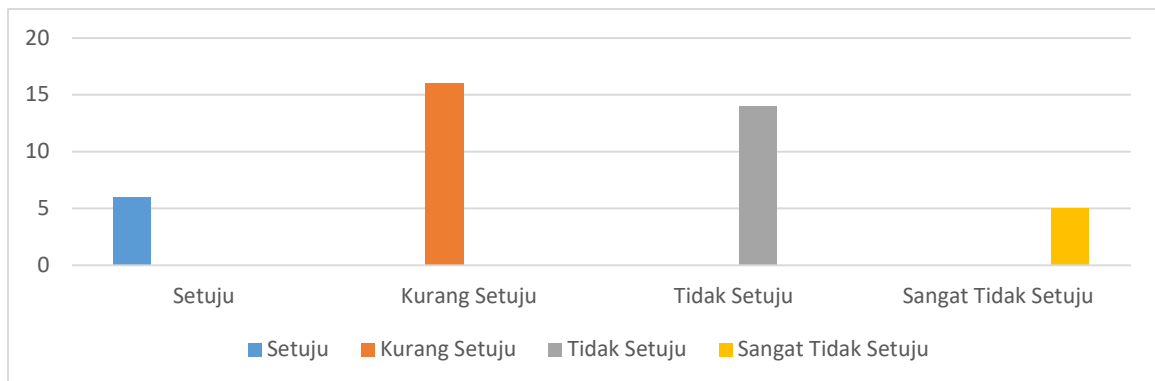


**Grafik 9. Penerimaan bertentangan dengan beda suku dan agama**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Dari hasil pre test menunjukkan bahwa masih ada peserta yang belum bisa menerima dengan tetangga yang berbeda suku dan agama serta belum bisa menerima teman yang berbeda suku dan agama, walaupun secara umum dia menerima bahwa Indonesia dan Lampung masyarakatnya adalah multicultural. Tetapi ada juga peserta yang belum bisa menerima bahwa Indonesia dan Lampung masyarakatnya adalah multicultural tetapi tidak mempermasalahkan bertetangga dengan masyarakat yang multicultural dan berteman dengan yang berbeda suku dan agama.

Kami juga menanyakan soal pilkada dan calon kepala daerah apakah peserta akan memilih calon kepala daerah berdasarkan kesamaan Suku dan Agama ternyata ada 6 peserta yang setuju untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki kesamaan suku dan agama. Sementara peserta yang lain menjawab kurang setuju ada 16 orang, menjawab tidak setuju ada 14 orang, dan menjawab sangat tidak setuju 5 orang berikut ini grafik tentang pilihan calon kepala daerah berdasarkan kesamaan suku dan agama :



**Grafik 10. Memilih cakada berdasarkan kesamaan suku dan agama**

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Berdasarkan hasil temuan tersebut masih ada peserta yang belum memiliki kesadaran wawasan kebangsaan karena memilih calon kepala daerah berdasarkan kesamaan suku dan agama. Kemudian masih ada peserta yang terlihat ragu-ragu karena menjawab kurang setuju karena jawaban ini menunjukkan pilihan mereka masih bisa berubah ke jawaban setuju.

Dari hasil pre test tersebut kemudian kami memberikan materi tentang wawasan kebangsaan dan demokrasi untuk memberikan kesadaran dan merubah pemahaman mereka soal politik identitas. Setelah kami memberikan materi ada perubahan soal penerimaan bahwa Indonesia adalah negara yang multicultural dan Lampung adalah provinsi dengan masyarakat yang multicultural. Dan juga kita harus bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang multicultural baik sebagai tetangga atau rekan. Soal pilkada kami memberikan materi bahwa untuk membentuk demokrasi yang sehat dan kuat saat kita memilih calon kepala daerah adalah kapasitas dan rekam jejaknya apakah layak atau tidak menjadi pemimpin bukan berdasarkan kesamaan suku dan agama.

#### **4. PENUTUP**

Hasil pre test pelatihan wawasan kebangsaan dan demokrasi yang kami lakukan terhadap pelajar dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung menunjukkan masih adanya generasi muda yang belum bisa menerima keragaman di Indonesia dan di Provinsi Lampung, dan masih adanya generasi muda yang belum bisa menerima perbedaan dilingkungan dan pertemanan walaupun tidak signifikan tapi cukup mengkhawatirkan. Pada pilihan calon kepala daerah di Pilkada juga masih ada generasi muda yang memilih atas dasar kesamaan suku dan agama. Kemudian kami memberikan pengertian dan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan demokrasi agar mereka mendapatkan pemahaman bahwa Indonesia dan Lampung adalah sebuah komunitas yang multicultural. Dan hasil post test berhasil mengubah pemahaman mereka.

Berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka diperlukan pelatihan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab akademisi yang melakukan kegiatan Tri Darma Pengabdian. Tetapi juga menjadi tugas para stake holder mulai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat membangun rasa nasionalisme pada generasi muda.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Budiardjo, M. (ed). (2003). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Ferrijana, S. dkk. (2012). *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Gunawan, H. (2018). Kapolri: Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Lampung Pengikut Jaringan JAD. *Tribunnews*, 5 Juni 2018. Diakses pada <https://www.tribunnews.com/regional/2018/06/05/kapolri-lima-terduga-teroris-yang-ditangkap-di-lampung-pengikut-jaringan-jad>.
- Pardiana, E. (2018). Tinggi, Potensi Radikalisme di Lampung. *Media Indonesia* 21 Maret 2018. Diakses pada [https://m.mediaindonesia.com/amp/amp\\_detail/150531-tinggi-potensi-radikalisme-di-lampung](https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/150531-tinggi-potensi-radikalisme-di-lampung).
- Yasland, M & Indrawan, A. (2016). Enam Daerah di Lampung Rawan Radikalisme. *Republika*, 23 November 2016. Dapat diakses pada: <https://www.republika.co.id/berita/oh3gwg365/enam-daerah-di-lampung-rawan-radikalisme>